

PENGELOLAAN EKOWISATA DI KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Leny Dwi Purnama Sari
Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: lenydwipurnama202@gmail.com

Abstrak

Collaborative governance menjadi parameter penting dalam menganalisis kegiatan di suatu daerah yang kaitannya untuk pengelolaan bahkan pengembangan sektor potensial di daerah tersebut. Wisata menjadi salah satu sektor paling potensial yang dioptimalkan di tiap daerah, termasuk Kabupaten Semarang yang dikenal sebagai surganya Jawa Tengah. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Semarang membuat peneliti untuk berfokus pada ekowisata yang ada. Wisata yang mewakili konsep ekowisata setidaknya yang diklasifikasikan dalam wisata budaya ataupun alam. Penelitian dilakukan pada dua wisata di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedongsongo dengan bercorak budaya dan Lereng Kelir yang diklasifikasikan dalam wisata bercorak alam. Penelitian dilakukan untuk melihat implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Metode penelitian yang digunakan didukung dengan menerapkan tipe penelitian eksplanatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan ekowisata dan *collaborative governance*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi *collaborative governance* pada pengelolaan ekowisata Candi Gedongsongo sudah cukup optimal, sedangkan implementasi *collaborative governance* pada pengelolaan ekowisata Lereng Kelir belum optimal lantaran belum adanya sinergi antar sektor.

Kata Kunci: ekowisata; *collaborative governance*; pengelolaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya hayati menjadi peluang sebagai daya tarik wisata. Daya tarik wisata yang bercorak alam, budaya, dan sejarah dapat dikatakan sebagai ekowisata. Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Wood (1999:119) bahwa ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Definisi lainnya terkait ekowisata adalah bentuk wisata konservatif yang dalam pengelolaannya dapat menciptakan industri pariwisata untuk kesejahteraan bersama.

Proses pengelolaan ekowisata tidak hanya dititik beratkan kepada peran pemerintah, namun juga berbagai sektor yang dalam hal ini peran swasta, komunitas, hingga masyarakat turut andil. Sinergi peran *stakeholders* tersebut divisualisasikan dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar sektor pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan atau menerapkan kebijakan publik atas pengelolaan program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2008:544).

Penelitian dilakukan pada ekowisata yang ada di Kabupaten Semarang. Wilayah Kabupaten dengan letak geografis mendukung kegiatan pariwisata menjadi unggulan wisata Provinsi Jawa Tengah dengan semboyan pariwisata Kabupaten Semarang yaitu “Surganya Jawa Tengah”. Wisata yang disuguhkan berupa wisata alam, budaya, khusus, dan buatan.

Banyaknya wisata tidak hanya memberikan peluang, namun di sisi lain juga menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan pengelolaan ekowisata yang begitu beragam. Peluang yang diberikan seperti dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat dengan wisatawan yang berkunjung, namun di balik hal tersebut terdapat hambatan berupa banyaknya wisata menjadi kurang optimal dalam pengelolaan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sektor swasta, dan masyarakat setempat daerah wisata.

Kabupaten Semarang dengan wisata yang beragam akan begitu kompleks jika dianalisis dengan perspektif *collaborative governance*. Terdapat dua ekowisata yang akan menjadi peran utama dalam pembahasan nantinya, yaitu Candi Gedongsongo sebagai salah satu representasi ekowisata dengan daya tarik

budaya dan Lereng Kelir sebagai salah satu representasi ekowisata dengan daya tarik alam. Alasan peneliti memilih kedua ekowisata dengan daya tarik yang berbeda dikarenakan ekowisata tersebut tidak hanya santer didengar wisatawan, namun juga pola wisata dan karakteristik yang hampir sama sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam bagaimana *stakeholders* mengelola ekowisata tersebut. Karakteristik yang dimaksud yaitu kedua ekowisata tersebut menyuguhkan pemandangan alam yang sama indahnya, berada di lingkup desa yang masyarakatnya berperan besar dalam pengelolaan wisata sehingga kontak sosial antara wisatawan dan masyarakat masih kental, dua destinasi wisata dengan budaya lokal yang beragam, serta dua ekowisata yang masih sangat potensial jika dieksplorasi.

Penggunaan *collaborative governance* menjadi konsep yang kompleks jika digunakan dalam menganalisis pengelolaan ekowisata. Dalam proses penelitian nantinya akan terdapat banyak temuan terkait upaya dan strategi apa saja yang sudah serta akan dilakukan oleh aktor dalam mengimplementasikan *collaborative governance* yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan tolak ukur variabel dalam mendapatkan temuan serta data lapangan. Penelitian yang berfokus

pada analisa *collaborative governance* digunakan untuk menjelaskan sinergi antar sektor dalam melakukan pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang.

Hal yang mendukung alasan dalam penelitian ini tidak hanya sebagai analisa peran dan sinergi yang telah bahkan akan dilakukan dalam pengoptimalan pengelolaan ekowisata. Terdapat suatu permasalahan lain yang dinilai peneliti sebagai permasalahan yang perlu diteliti karena tidak hanya mendapatkan temuan, namun juga dapat sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengelola sektor potensialnya berupa wisata konservatif di Kabupaten Semarang yang beragam baik alam maupun budayanya, masih kalah saing dengan wisata baru yang berupa daya tarik wisata buatan. Ekowisata sebagai wisata konservasi baik alam maupun budayanya masih belum dapat bersaing dengan daya tarik wisata buatan baik secara kualitas maupun kuantitas yang gencar dioptimalkan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal pengelolaan dan pengembangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah sedikit disinggung dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah berupa bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam

pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu mendapatkan temuan dan menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar sektor pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan atau menerapkan kebijakan publik atas pengelolaan program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2008:544). *Collaborative governance* dapat juga diartikan sebagai jenis tata kelola yang dilakukan oleh aktor publik dan swasta yang bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda.

Menurut Ansell and Gash (2008: 550 – 561) terdapat model *collaborative governance* sebagai representasi proses kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder*. Terdapat variabel-variabel yang harus diperhatikan sebelum proses kolaborasi

diimplementasikan. *Pertama*, kondisi awal yang dialami oleh para *stakeholder*, seperti kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang tidak seimbang, misalnya: pengetahuan yang dimiliki komunitas pariwisata dengan masyarakat yang harus diseimbangkan dan masyarakat perlu melakukan koordinasi serta sinkronisasi dalam turut andil mengelola ekowisata sehingga dapat mengurangi hambatan. *Kedua*, kepemimpinan fasilitatif sebagai proses menyatukan *stakeholder* dan membagi peran serta tanggung jawab dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan ekowisata, misalnya: sektor swasta berperan dalam membantu pemerintah sebagai penyedia fasilitas pendukung, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di kawasan ekowisata. *Ketiga*, desain institusionalis dibentuk sebagai peraturan dan landasan dalam menjalankan kolaborasi.

Ketiga aspek tersebut yang mendasari proses kolaborasi berjalan dalam pengelolaan ekowisata. Proses kolaboratif yang terjadi juga masih memiliki siklus dimulai dari dialog tatap muka untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Kepercayaan yang telah terbentuk perlu adanya komitmen bersama dalam

menjalankan proses kolaborasi berupa transparansi dan saling memahami tiap *stakeholder* memiliki peran yang sama pentingnya. Kesamaan pemahaman akan terbangun jika kepercayaan sudah terbentuk, menyamakan pemahaman diwujudkan dengan visi misi dalam mengelola ekowisata. Visi misi yang mulai dijalankan lalu menghasilkan *output* menengah yang ditemukan saat proses kolaborasi berlangsung, seperti menemukan rencana strategis baru yang diperlukan dalam melakukan proses pengelolaan ekowisata. Tahap tersebut menjadi siklus yang divisualisasikan dengan anak panah yang dapat juga diartikan sebagai siklus yang bergerak dinamis di dalam proses kolaborasi hingga mencapai *outcome* yang optimal.

2. Pengelolaan Ekowisata

Konsep ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Wood, 1999:119 bahwa ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata yang dapat dikatakan sebagai wisata konservasi baik berupa alam, budaya, dan sejarah yang apabila dieksplorasi dengan optimal maka akan berdampak bagi masyarakat setempat dan dalam

sektor wisata yang selalu menjadi sektor potensial tiap daerah. Wisatawan yang berkunjung ke ekowisata tidak hanya untuk berwisata namun juga berupaya dalam melestarikan kawasan konservasi dan menambah pengetahuan.

Pengelolaan ekowisata adalah proses mengelola atau melakukan kegiatan merawat ekowisata dengan menggerakkan jasa, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pada semua hal terkait ekowisata. Kegiatan menggerakkan jasa dilakukan sesuai dengan sumber potensial yang dimiliki suatu destinasi wisata. Menurut Soekmadi, dan Kartodihardjo (2010: 85) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan ekowisata dirancang berdasar pada hasil analisa dari faktor penentu. Dalam menentukan faktor penentu tersebut, maka dilakukan analisa yang terdiri dari dua tahap, yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses pengelolaan pariwisata yang dalam penelitian ini yaitu ekowisata; *Kedua*, menentukan faktor penentu dalam proses pengelolaan ekowisata berdasar pada hasil kajian dari badan dan studi literatur.

Terdapat faktor penentu yang mempengaruhi proses pengelolaan

ekowisata, antara lain: Potensi Objek Daya Tarik Wisata; Kebijakan Pemerintah Daerah; Permintaan Ekowisata; Partisipasi Masyarakat; Sarana dan Prasarana; Keamanan; Penataan Ruang Wisata; Promosi dan Pemasaran; Kapasitas Kelembagaan; Manajemen Atraksi; Kerja Sama Antar Daerah; Kontribusi Ekonomi; dan Pendidikan Masyarakat. Setelah membagi faktor penentu tersebut, maka dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam mengelola ekowisata.

Setelah penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan ekowisata, maka terdapat pula konsep aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Ilustrasi yang menjelaskan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini.

Gambar 1.3 Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata



Sumber: Wearing and Donald 2001

Peneliti dalam mencari jawaban permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial.

Peneliti telah melakukan wawancara secara mendalam kepada informan kunci maupun informan lainnya guna mendapatkan akurasi data. Data yang berupa kata atau teks tersebut dianalisis dan dikembangkan dengan interpretasi peneliti untuk menangkap arti yang lebih dalam. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan non positivis, peneliti memasukkan interpretasinya dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang mendeskripsikan secara rinci terkait kolaborasi yang dilakukan para aktor dan strategi yang digunakan dalam pengelolaan ekowisata. *Stakeholder* menjalankan kolaborasi tersebut seperti apa didukung dengan bukti temuan di tempat ekowisata, yaitu Candi Gedongsongo sebagai salah satu representasi ekowisata dengan daya tarik budaya dan Lereng Kelir sebagai salah satu representasi daya tarik wisata alam.

METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Menurut Yoeti (1997) dalam Irwan dan Towoliu (2021:16), berdasarkan objeknya ekowisata terbagi atas dua jenis, yakni ekowisata alam dengan karakteristik dapat dilihat dan dirasakan (pemandangan alam, flora, fauna, hutan), dan ekowisata budaya dengan karakteristik adanya kebudayaan yang tidak hanya dapat dilihat atau disaksikan, melainkan juga dapat dipelajari. Penelitian dilakukan di dua lokus yang berbeda untuk melihat perbedaan pengelolaan ekowisata yang ada di Kabupaten Semarang dengan corak budaya dan alam.

Peneliti menganalisis pengelolaan pada Wisata Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir dengan menggunakan teori *collaborative governance*. Model kolaborasi yang membentuk proses kolaborasi terdiri dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusional. Peneliti mendapati temuan *collaborative governance* pada pengelolaan wisata di Kabupaten Semarang sebelum mendalami pada lokus penelitian.

Kondisi awal, dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membangun relasi dengan aktor untuk berkolaborasi bersama dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD karena pengelolaan

ekowisata tidak hanya menjadi salah satu bidang di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, namun diperlukan *stakeholder* yang terlibat dalam rangka pengelolaan ekowisata. Dalam pelaksanaan pembangunan relasi di tiap Daya Tarik Wisata (DTW) memiliki keunikan masing-masing yang tidak bisa disamakan, karakter wisata di tiap-tiap objek memiliki perbedaan termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

Kepemimpinan fasilitatif, yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam pengelolaan ekowisata dilakukan baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang kepada pelaku usaha wisata memberikan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik maupun pada saat pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dengan memberikan saran dan masukan.

Desain institusional, digunakan dalam mendukung proses pengelolaan bahkan hingga pengembangan ekowisata berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030.

Proses eksekusi tahap kolaborasi menjadi tahap puncak dari rangkaian tahap-tahap sebelumnya. Hambatan dan

tantangan yang ditemui pada proses kolaborasi diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yakni aspek lingkungan, aspek adat istiadat, dan karakter masyarakat setempat.

Hambatan dan tantangan yang dijumpai pada proses kolaborasi tentu ditangani dengan evaluasi. Pada proses evaluasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama supaya tidak ada *stakeholder* yang dirugikan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Proses evaluasi dilakukan secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

Berpindah dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh tiap-tiap *stakeholder* dalam analisis *collaborative governnace* di lokus penelitian, kini pembahasan beralih ke pengelolaan ekowisata secara keseluruhan. Pengelolaan ekowisata tidak lepas dari adanya strategi dan rencana. Strategi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Semarang dalam Rencana Strategis terbagi atas dua hal, yakni strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis 2016 - 2021 dalam strategi pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, antara lain:

1. Pengembangan destinasi:
 - a. Pengembangan sosialisasi dan penerapan, pengawasan standarisasi, serta sosialisasi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Semarang kepada penyedia jasa; dan
 - b. Pengembangan daerah tujuan wisata serta melaksanakan pemeliharaan keindahan, ketertiban, dan kenyamanan.
2. Pengembangan pemasaran:
 - a. Pengembangan statistik objek, DTW, dan usaha jasa yang dilakukan dengan pendataan jumlah pengunjung;
 - b. Pelatihan pemandu wisata terpadu sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dan
 - c. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, hal tersebut digunakan untuk meningkatkan peluang pembuatan kerja sama dengan Swasta dan BUMN.
3. Pengembangan kemitraan:
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan dengan pembentukan dan pembinaan Pokdarwis, seperti Pokdarwis Duren, Diwak, Godongdalem, dan Brongkol; dan
 - b. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata yang dilakukan dengan

melaksanakan temu usaha dan pembinaan pengelola usaha rumah makan dan fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku pariwisata.

Rencana pengelolaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata pada periode selanjutnya yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tidak jauh berbeda dengan strategi yang diterapkan Dinas Pariwisata pada periode sebelumnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengerucutkan strateginya dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi, dalam upaya peningkatan lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel, ditempuh dengan pengembangan dan penataan daya tarik wisata;
2. Pengelolaan pemasaran, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan perlu adanya promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan kalender *event* skala nasional-internasional yang berbasis teknologi digital; dan
3. Pengembangan kemitraan, dalam upaya untuk mewujudkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berstandarisasi akan ditempuh dengan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan pelaku wisata.

Hasil temuan dan analisis pada lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni di dua DTW dengan Candi Gedongsongo yang bercorak budaya dan Wisata Lereng Kelir yang bercorak alam. Temuan yang ada dikaitkan dengan proses kolaborasi terjadi dan apakah teori *Collaborative Governance* sudah optimal. Peneliti mendapati temuan yang di luar ekspektasi, bahkan menemukan jurang permasalahan baru terkait teori yang diambil nyatanya sangat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Berikut hasil temuan peneliti atas dua DTW.

Analisa *collaborative governance* pada ekowisata Candi Gedongsongo digunakan dalam melihat kolaborasi yang dilakukan pada *stakeholder* dalam bersama mengelola ekowisata tersebut. Tahapan diawali dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan akhirnya terbentuk kolaborasi.

Kondisi awal, membangun relasi dengan *stakeholder* dalam berkolaborasi yakni dengan menyatukan visi misi dan tujuan yang notabeneanya memiliki kesamaan dalam mengelola dan mengembangkan Wisata Candi Gedongsongo. Berangkat dari persamaan kepentingan tersebut, para *stakeholder* akan mendapatkan manfaat, seperti memperoleh bagi hasil dari *output* pengelolaan wisata tersebut dan

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Candi Gedongsongo juga dikelola oleh tiga instansi pemerintah, yaitu ada dari PT Perhutani, BPCB Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Para *stakeholder* tersebut kemudian membuat perencanaan sebelum pelaksanaan sebuah program kerja, disusul dengan melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat.

Kepemimpinan fasilitatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menunjukkannya dengan melestarikan lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam hal merawat lingkungan dengan menjaga kebersihannya dan melakukan reboisasi di sekitar wisata. Pada hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan tempat bagi pelaku usaha baik jasa kuda, fotografer, dan UMKM.

Desain institusional, terkait pengadaan aturan pengelolaan wisata. Dalam pengelolaannya, sudah ada nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kedu Utara tentang Pemanfaatan Kawasan dan Bagi Hasil Retribusi Masuk Objek Wisata Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang

Provinsi Jawa Tengah Nomor 415.4/21/KJS/2020, Nomor 9438/F/KU/2020, dan Nomor 04/043.7/KUMKDU/DIVREJATENG/2020. Nota kesepakatan bertujuan untuk menyinergikan dan memadukan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang yang bermanfaat bagi para pihak. Pihak terkait setidaknya mendapatkan keuntungan retribusi, antara lain: Pihak kesatu, Pemerintah Kabupaten Semarang sebanyak 60%; Pihak kedua, Direktorat Jenderal yang berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 25%; dan Pihak ketiga, Perum Perhutani sebanyak 15%.

Tahap-tahap yang sudah berjalan membentuk proses kolaborasi. Dalam keberjalannya tentu menemui hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang dialami lantaran semakin banyaknya objek wisata di Kabupaten Semarang, terlebih lagi terdapat pula objek wisata yang berdekatan dengan Wisata Candi Gedongsongo seperti Taman Bunga Celosia Bandungan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses peningkatan kualitas objek, sehingga pengelola senantiasa bekerja sama dengan sektor-sektor objek yang berdekatan dengan Candi Gedongsongo maupun sektor yang bekerja di dalam pengelolaan Candi Gedongsongo.

Hambatan dan tantangan yang ada ditangani dengan rencana strategis. Rencana strategis diberlakukan berdasarkan hasil analisa penentu yang digunakan untuk optimalisasi Candi Gedongsongo. Berikut rencana strategis berdasarkan hasil analisa penentu pada lokus Wisata Candi Gedongsongo.

a. Potensi objek DTW

Candi Gedongsongo menjadi wisata paling potensial dan unggulan di Kabupaten Semarang, sehingga pengelola mengupayakan untuk menjaga dan merawat situs-situs bersejarah yang bekerja sama dengan BPCB Jawa Tengah;

b. Kebijakan Pemda

Strategi pengelolaan wisata di Kabupaten Semarang didukung dengan adanya Peraturan bupati Nomor 111 Tahun 2011 yang mana di dalamnya memuat upaya pengelolaan wisata;

c. Permintaan ekowisata

Pengelola berinovasi dengan pembangunan balai dan tempat untuk bersua foto;

d. Partisipasi masyarakat

Masyarakat juga diberdayakan dalam mendirikan UMKM di kawasan wisata, juru parkir juga berasal dari masyarakat sekitar, begitu pula pada paguyuban jasa kuda;

e. Sarana dan prasarana

Pengelola Wisata Candi Gedongsongo juga sedang mengupayakan pembangunan MCK dan pembangunan lahan parkir,;

f. Keamanan

Candi Gedongsongo dilengkapi dengan pos-pos keamanan di beberapa titik riskan, hanya saja pos jaga yang ada di beberapa titik tersebut kerap tidak dijaga oleh satpam;

g. Penataan ruang wisata

Pengelola sedang mengupayakan pembangunan *landscape* dan pelebaran lahan parkir;

h. Promosi dan pemasaran

Pemasaran dilakukan dengan media sosial salah satunya akun di salah satu *platform*, yakni *instagram @pesona_kabupatensemarang*;

i. Kapasitas kelembagaan

Terdapat struktur organisasi dalam pembagian tugas. Pada Staf UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sudah cukup memenuhi tupoksi, namun pada BPCB yang turut mengelola wisata tersebut masih kekurangan tenaga dalam proses pengelolaan, perawatan, dan pengawasan candi;

j. Manajemen atraksi

Memberikan aspek wisata pendukung seperti tempat berfoto dan wisata kuliner untuk menarik minat wisatawan;

- k. Kerja sama antar daerah
Pengelola Wisata Candi Gedongsongo yang juga berada di bawah naungan BPCB Jawa Tengah;
- l. Kontribusi ekonomi
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang langsung meminta untuk setiap objek wisata melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- m. Pendidikan masyarakat
Pengelola dengan Dinas Pariwisata kerap melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan pada masyarakat.

Analisa *collaborative governance* pada ekowisata Lereng Kelir digunakan dalam melihat kolaborasi yang dilakukan pada *stakeholder* dalam bersama mengelola ekowisata tersebut. Tahapan diawali dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan akhirnya terbentuk kolaborasi.

Kondisi awal, dalam membangun relasi dalam pencetusan wisata bermula pada tahun 2016 berawal dari perkumpulan penikmat kopi yang kemudian tercetuslah pembangunan wisata di dusun mereka tepatnya pada Dusun Gertas, Desa Brongkol yang dimulai dari swadaya pemuda-pemuda yang memiliki gagasan tersebut. Awal pembangunan dilakukan dengan membuat tempat berfoto

lantaran pemandangan yang disuguhkan, sehingga wisata yang baru terbentuk tersebut langsung mencuat tidak hanya di masyarakat, namun juga di media berita. Proses tersebutlah yang mengawali para pemuda pencetus Wisata Lereng Kelir bertemu dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada forum Pokdarwis. Pada awal kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, dinas tidak bisa intervensi karena murni dikelola oleh desa, meskipun dalam pembinaannya bisa mengarahkan dan memberikan masukan dalam upaya memajukan wisata di Lereng Kelir, tetapi tidak bisa memiliki intervensi lebih. Hal tersebut cukup kontradiktif dengan kenyataan di lapangan saat ini, bahwa Dinas Pariwisata hanya memberikan pendidikan pada masyarakat di tahun awal pembentukan wisata dan berhenti tanpa memberikan pengawasan, pembinaan, dan pelatihan hingga saat ini.

Kepemimpinan fasilitatif, pengelola wisata melakukan rencana strategis dalam pengelolaan wisata dengan adanya campur tangan Dinas Pariwisata dalam memberikan pelatihan dan pembinaan pada tahun pertama wisata ini dibentuk. *Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan Wisata Lereng nyatanya hanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang terdiri dari Karang Taruna Desa Brongkol dan Pengelola.

Desain institusional, *stakeholder* yang terlibat terdiri dari masyarakat dengan sedikit campur tangan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Hal tersebut mempengaruhi kurang optimalnya proses kolaborasi berjalan karena tidak adanya aturan dalam pengelolaan ekowisata tersebut.

Proses kolaborasi tidak berjalan dengan optimal lantaran *stakeholder* yang seharusnya ada dan terlibat penuh. Hal tersebut tentu mempengaruhi pengelolaan yang menyangkut pemasaran pula, sehingga ekowisata tersebut mulai redup di masyarakat.

Pengelolaan yang dilakukan hanya oleh sektor masyarakat, membuat peran mereka menjadi paling utama. Berikut rencana strategis yang diupayakan oleh masyarakat dan pengelola Wisata Lereng Kelir dalam menghidupkan eksistensinya kembali.

a. Potensi objek DTW

Wisata Lereng Kelir masuk ke dalam klasifikasi wisata alam dengan menyuguhkan pemandangan perkebunan kopi dan pegunungan yang membentang sejauh mata memandang;

b. Kebijakan Pemda

Strategi pengelolaan wisata di Kabupaten Semarang didukung dengan adanya Peraturan bupati Nomor 111 Tahun 2011 yang mana di dalamnya memuat upaya pengelolaan wisata;

c. Permintaan ekowisata

Pengunjung yang menggemari foto-foto untuk mengabadikan wisatanya, menjadi salah satu upaya yang dilakukan pengelola untuk membangun *spot* untuk bersua foto;

d. Partisipasi masyarakat

Masyarakat setempat saling bergotong-royong dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Masyarakat berperan besar dalam membangun akses jalan baik dengan swadaya maupun dengan Banprov. Adanya wisata yang dekat dengan pemukiman warga membuat warga setempat sempat beralih profesi menjadi tukang ojek untuk menawarkan jasanya pada pengunjung untuk naik dan turun lereng menggunakan kendaraan, sehingga dari wisata tersebut dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat;

e. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana yang masih menjadi kendala, menjadi salah satu hambatan terbesar pengelola untuk terus berupaya membangun akses jalan yang setidaknya setengah perjalanan menuju puncak gardu pandang masih berupa tanah belum berupa cor, sehingga ketika musim hujan tiba menyebabkan akses jalan tidak bisa dilalui baik

dengan kendaraan maupun berjalan kaki;

f. Keamanan

Aspek keamanan yang diberikan pengelola sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah direnovasinya jembatan dan tempat gardu pandang yang sebelumnya beralaskan kayu dan bambu saat ini sudah dibenahi menjadi besi;

g. Penataan ruang wisata

Pengelola wisata sudah membentuk *landscape* mulai dari lahan parkir yang dekat dengan pemukiman warga, kedai kopi dengan pemandangan yang disuguhkan, akses jalan menuju puncak, pos ojek, hingga gardu pandang untuk berfoto;

h. Promosi dan pemasaran

Pengelola Wisata Lereng Kelir masih memiliki keterbatasan dalam melakukan promosi karena belum adanya pihak yang ahli dalam segi media, sehingga pemasaran yang dilakukan cukup pasif. Keterbatasan tersebut tidak menyurutkan promosi yang dilakukan, sehingga promosi dilakukan seadanya di *platform Instagram* dan *Facebook*;

i. Kapasitas kelembagaan

Kelembagaan yang diterapkan dalam pengelolaan dilakukan oleh swadaya Karang Taruna serta masyarakat;

j. Manajemen atraksi

Pengelola Wisata Lereng Kelir mengupayakan untuk membuat paket wisata, seperti berkebun dan belajar memetik kopi pada lahan perkebunan kopi, belajar membuat kopi atau menjadi barista, dan mendaki gunung;

k. Kerja sama antar daerah

Pengelola Wisata Lereng Kelir melakukan kerja sama antar daerah untuk bertukar ide dan gagasan terkait pengelolaan dan pengembangan wisata;

l. Kontribusi ekonomi

Wisata yang dipegang sendiri oleh masyarakat tentu memberikan nilai ekonomi yang tinggi pula, seperti retribusi parkir, tiket masuk, dan biaya penggunaan jasa ojek untuk menaiki ataupun menuruni lereng; dan

m. Pendidikan masyarakat

Pendidikan masyarakat tidak begitu baik dilakukan dalam rencana strategis pengelolaan wisata lantaran tidak dilakukan kembali pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sehingga pengelolaan wisata dilakukan kurang optimal.

Peneliti mendapatkan hasil bahwa proses kolaborasi memengaruhi proses pengelolaan dan strategi yang diimplementasikan. Proses kolaborasi yang tidak optimal tentu menjadi pengaruh besar dalam strategi pengelolaan wisata.

Pada Wisata Candi Gedongsongo sudah cukup optimal dalam pengelolaan dan kolaborasi. Pada Wisata Lereng Kelir yang proses kolaborasinya belum cukup optimal lantaran pengelolaan sedang dilakukan penuh oleh salah satu sektor saja, yakni masyarakat setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *Collaborative Governance* menggambarkan kolaborasi dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam suatu proses. Peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* untuk menganalisis proses kolaborasi pada 2 (dua) ekowisata yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedong Songo dengan DTW bercorak budaya dan Wisata Lereng Kelir dengan DTW bercorak alam.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sendiri dalam proses pengelolaan wisata dan ekowisata berpedoman pada rencana strategis yang diimplementasikan selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut juga menjadi tolak ukur peneliti dalam melihat bagaimana upaya pengelolaan dilakukan.

Peneliti mendapati temuan pada Wisata Candi Gedong Songo dalam proses kolaborasi untuk pengelolaannya sudah sesuai dengan teori *Collaborative Governance*. *Stakeholder* yang terlibat proses kolaborasi dalam mengelola ekowisata tersebut antara lain: Pemerintah

(Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, dan Perum Perhutani); Swasta (Pengelola wisata yang berada baik di kawasan Candi Gedong Songo maupun yang memiliki jarak berdekatan dengan Candi Gedong Songo); dan Masyarakat (Paguyuban Jasa Kuda, Paguyuban Fotografer, dan Paguyuban UMKM). Proses pengelolaan dilakukan oleh sinergi antar stakeholder terkait dengan mengupayakan strategi pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan analisis penentu yang sudah diimplementasikan dengan baik

Peneliti mendapatkan temuan data primer dan sekunder yang dapat dikatakan kurang sinkron. Hal tersebut dibuktikan pada proses kolaborasi untuk pengelolaannya masih belum mengoptimalkan dari teori *Collaborative Governance* yang mana hanya masyarakat yang berperan besar dalam mengelola ekowisata tersebut dan andil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang maupun swasta tidak sebesar andil masyarakat. Masyarakat yang saling bersinergi mengelola Wisata Lereng Kelir, yakni Karang Taruna Desa Brongkol dan masyarakat sekitar. Pengelola Lereng Kelir mengatakan jika Pemerintah pada hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang hanya memberikan pelatihan dan pengawasan di awal penemuan ekowisata. Pada sektor swasta dilakukan dengan

kolaborasi dengan pengelola wisata lainnya yang dikelola oleh swasta.

Peneliti berhasil mendapatkan temuan implementasi *collaborative governance* dan strategi dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Semarang serta ekowisata yang menjadi dua fokus penelitian. Dua tempat yang berbeda dan hasil yang berbeda pula, namun memiliki kesamaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan, yakni masih mengupayakan peningkatan kualitas ekowisata yang ada di dalamnya.

B. Saran

Peneliti dalam melihat kolaborasi dan pengelolaan yang dilakukan para stakeholder pada ekowisata Candi Gedong Songo dan Lereng Kelir dengan teori Collaborative Governance dan strategi pengembangan wisata. Peneliti bertujuan melihat implementasi pada lokus penelitian sudahkan konsep yang digunakan peneliti diterapkan pada dua ekowisata tersebut. Hal menarik yang ditemui peneliti dalam proses penelitian bahwa terdapat data primer yang kenyataannya berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang kurang menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata dengan tidak banyak berkontribusi pada wisata yang ada di seluruh Kabupaten Semarang dan hanya berfokus pada

pengelolaan wisata yang memiliki potensial tinggi.

Saran yang peneliti berikan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, antara lain: lebih berkontribusi pada pelatihan, pengawasan, dan evaluasi pada setiap objek wisata di Kabupaten Semarang; bertanggung jawab pada jumlah kunjungan tiap objek wisata di Kabupaten Semarang; serta menerapkan strategi pengelolaan dan pengembangan wisata pada seluruh objek tidak hanya pada 5 (lima) objek wisata potensial yang dikelola dengan mulai dari pengembangan destinasi, pengelolaan pemasaran, pengembangan kemitraan, dan intervensi dalam memberikan anggaran dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata. Peneliti menganggap saran tersebut dapat tercapai jika dilakukan pembenahan dan komitmen tiap stakeholder untuk saling berkolaborasi meningkatkan wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication Inc
- Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. (2020). Renstra Tahun 2021 – 2026 Disparta
- Irwan, B., & Towoliu. (2021). Kajian Penilaian Desa Bahoi sebagai Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara. Sumatera Barat: Azka Pustaka
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara tentang Pemanfaatan Kawasan dan Bagi Hasil Retribusi Masuk Objek Wisata Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor 415.4/21/KJS/2020, Nomor 9438/F/KU/2020, Nomor 04/043.7/KUM-KDU/DIVRE JAWA TENGAH/2020
- Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010). Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. *Media Konservasi*, 15(2).
- Wearing, S., & McDonald, M. (2002). The development of community-based tourism: Re-thinking the relationship between tour operators and development agents as intermediaries in rural and isolated area communities. *Journal of sustainable tourism*, 10(3), 191-206.
- Wood, M. E. (1999). The Ecotourism Society—An International NGO Committed to Sustainable Development. *Tourism Recreation Research*, 24(2), 119-123.